BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemungutan pajak di Indonesia pada saat ini menerapkan sistem *self assessment* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Pranadata, 2014) dalam (Nugraheni dan Purwanto, 2015). Dengan memberikan kebebasan dalam menghitung pajak, maka perlu adanya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi negara agar tercapainya kepatuhan perpajakan yang dilakukan dengan sukarela.

Pajak merupakan sumber penerimaan untuk kelangsungan hidup negara dalam membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Di Indonesia pajak merupakan salah satu pendorong aktivitas perekonomian yang penting dan menjadi tulang punggung penerimaan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya target penerimaan negara yang diperoleh dari pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target>).

Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak (Artha dan Setiawan, 2016). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sangat dibutuhkan, mengingat pemerintah Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan untuk kelangsungan hidup negara. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Tiraada, 2013) dalam (Rahayu,2017).

Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari faktor pengetahuan tentang perpajakan itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Putri dan Setiawan, 2017). Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan, maka dengan sadar wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017).

Wajib pajak yang sudah mengetahui ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan, dapat melaporkan SPT secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dapat melaporkan secara online. Tetapi masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai karyawan maupun non karyawan, khususnya wajib pajak orang pribadi belum mengetahui tentang pelaporan pajak. Hal ini yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan (Kemenkeu) per akhir Desember 2019 realisasi tingkat kepatuhan pajak dari pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) mencapai 73% atau masih lebih rendah dibandingkan dengan target awal tahun yang mencapai 80%. Berdasarkan data tersebut, wajib pajak (WP) terdaftar wajib SPT pada 2019 sebanyak 18.330.000 WP yang terdiri dari 13.810.000 WP OP karyawan, 3.040.000 WP OP non karyawan, dan 1.470.000 WP badan. Namun wajib pajak yang berusaha patuh melaporkan SPT hanya sebanyak 13.361.668 WP yang terdiri dari 10.110.000 WP OP karyawan, 2.290.000 WP OP non karyawan, dan 961.668 WP badan.

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila menerima dan memperoleh penghasilan merupakan salah satu wujud kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, baik fiskus pajak maupun wajib pajak berpedoman pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang, termasuk sanksi perpajakan (Nugraheni dan Purwanto, 2015). Setiap pelanggaran pajak dari tingkat kecil hingga berat sudah diatur dan terdapat ancaman sanksi-sanksinya. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi wajib pajak yang melanggar agar tidak mengulang lagi kesalahan dan mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu menghilangkan satu variabel *Tax Amnesty*, karena variabel tersebut dirasa awam digunakan untuk penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tax amnesty lebih cocok digunakan untuk penelitian terhadap wajib pajak badan yang berpenghasilan hingga Rp. 4,8 miliar pada Tahun Pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja atau pekerjaan bebas. Penelitian ini juga menambahkan satu variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak dari penelitian Primasari (2016) yang menguji Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dan penelitian sekarang menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Madiun.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup negara sebagai modal pencapaian pembangunan dan saat ini rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan masih belum mencapai target, hal ini didasari pada perbandingan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT masih sedikit atau tidak sama dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar sehingga perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan berbagai variabel yang memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Madiun?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Madiun?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Madiun
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Madiun
3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Madiun

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak, dapat menjadi masukan tentang pentingnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.
2. Bagi Akademisi, menambah suatu bukti empiris dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Sistematika penulisan laporan skripsi terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang desain penelitian; identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; dan teknis analisis.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

Bab V : Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.